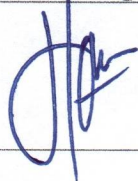


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : 30 Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 1/ 17 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-Melebihi SN-Dikti
------------------------------	--------------------------------

STANDAR MUTU

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		30/1/29
Pemeriksaan	Dr. Imam Sarwo Edi, S.SiT, M.Pd	Wadir II		30/1/29
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep.Sp.Kom	Wadir I		30/1/29
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur		30/1/29
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		30/1/29

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 2/ 17 halaman

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	Visi : “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025“. Misi : 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri Tujuan : Menjadikan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai rujukan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memiliki moralitas dan integritas dengan keunggulan kualitas global pada tahun 2025 melalui : 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam kompetensinya di bidang kesehatan; 2) Menghasilkan penelitian dasar dan terapan di bidang kesehatan yang menjadi rujukan di level nasional maupun internasional; 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mampu mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat 4) Menerapkan sistem penjaminan mutu internal untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas global; 5) Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang dapat dipertanggung jawabkan, dan
---	--

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 3/ 17 halaman

	6) Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dengan mitra dalam pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi Sasaran : Sasaran yang akan dicapai di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya adalah: 1) Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan iptek pada pendidikan vokasi dan profesi; 2) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan perkembangan iptek pada pendidikan vokasi dan profesi; 3) Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan iptek pada pendidikan vokasi dan profesi; 4) Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan SDM yang unggul pada pendidikan vokasi dan profesi; 5) Meningkatnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, akuntabel, transparan, kredibel, dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi; 6) Meningkatnya sarana prasarana yang terstandar untuk menunjang pendidikan sesuai dengan perkembangan iptek pada pendidikan vokasi dan profesi.; 7) Meningkatnya sarana prasarana yang terstandar untuk menunjang penelitian sesuai dengan perkembangan iptek pada pendidikan vokasi dan profesi; 8) Meningkatnya sarana prasarana yang terstandar untuk menunjang pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan iptek pada pendidikan vokasi dan profesi; 9) Meningkatnya kerjasama pendidikan baik dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri; 10) Meningkatnya kerjasama penelitian baik dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri; 11) Meningkatnya kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri;
--	---

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 4/ 17 halaman

	12) Meningkatnya sistem penjaminan mutu di seluruh program studi dan institusi; 13) Meningkatnya sistem pengawasan mutu internal (AMI), dan 14) Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi manajemen akademik dan non akademik Budaya Organisasi Budaya organisasi yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan istilah “JUMATAN”, kepanjangan dan memberikan makna sebagai berikut : 1) Jujur Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam membangun organisasi dilandasi budaya jujur dalam perbuatan (kinerja) dimulai dari kejujuran para pemimpinnya 2) Amanah Budaya jujur perlu diimbangi dengan amanah, artinya semua pekerjaan yang dilakukan semuanya dapat dipercaya dan diandalkan sehingga cita-cita organisasi dapat terwujud 3) Taat Budaya jujur dan amanah dijalankan dengan ketaatan terhadap hukum sehingga kinerja Poltekkes Kemenkes Surabaya selalu berada di jalur yang benar dan lurus 4) Semangat Budaya jujur, amanah dan taat hanya bisa dicapai manakala semua unsur sumber daya manusia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya semangat menjalankan misi organisasi untuk mencapai visi
2. Rasional	Standar mutu tata pamong dan tata kelola diperlukan sebagai acuan dalam pengelolaan sistem tata pamong dan tata kelola organisasi perguruan tinggi pada Poltekkes Kemenkes Surabaya. Standar mutu ini ditetapkan sebagai arah agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Mekanisme

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 5/ 17 halaman

	perumusan dan penetapan disepakati bersama para pimpinan dan pemngelola Poltekkes Kemenkes Surabaya agar perwujudan tata pamong merupakan standar praktik baik dan bisa dipercaya dalam mencapai visi dan misi institusi. Standar mutu tata pamong dan tata kelola ini ditetapkan untuk menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik, bersih, dan akuntabel yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi menggunakan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar mutu tata pamong dan tata kelola diperlukan untuk menjamin terpilihnya pemimpin pada unit pengelola program studi (UPPS) dan program studi (PS) secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Melalui jaminan mutu ini maka kepemimpinan pada UPPS dan PS bisa dipercaya, transparan, akuntabilitas, tanggungjawab, dan berkeadilan. Standar mutu tata pamong dan tata kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi pada Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai UPPS, dalam rangka memenuhi: - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); - Permendikbudristek R.I No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Permenkes R.I No. 12 tahun 2023 tentang Prubahan atas Permenkes No. 71 tahun 2020 tentang Organisasi da Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kemterian Kesehatan - Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar	- Direktur bertanggung jawab dalam penetapan standar mutu tata pamong dan tata kelola; - Senat Akademis memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap standar mutu tata pamong dan tata



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA

Kode : PJM-ST-PD-03

Tanggal : Januari 2023

Revisi : 1

Halaman : 6/ 17 halaman

kelola;

3. Wakil Direktur II bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf standar mutu tata pamong dan tata kelola;
4. Wakil Direktur I bidang Akademik dan Wakil Direktur III bidangmg Kemahasiswaan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas isi standar mutu tata pamong dan tata kelola;
5. Kepala Bagian Umum dan Akademik bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar mutu tata pamong dan tata kelola di bidang ketersediaan dokumen, kebijakan, keputusan, peraturan dan buku panduan lainnya;
6. Kasubbag Administrasi akademik membantu Kepala Bagian Umum dan Akademik dalam mempersiapkan dokumen formal, kebijakan, keputusan, peraturan dan buku pedoman yang diperlukan;
7. Direktur, Para Wakil Direktur, Kepala bagian, Kepala SPI, Kepala Sub Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Koordinator di bawah Pusat, Ketua Program Studi dan Koordinator di bawah Kaprodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar mutu tata pamong dan tata kelola;
8. Direktur, Para Wakil Direktur, Kepala bagian, Kepala SPI, Kepala Sub Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Koordinator di bawah Pusat, Ketua Program Studi dan Koordinator di bawah Kaprodi bertanggungjawab dalam evaluasi diri untuk pelaksanaan standar mutu tata pamong dan tata kelola;
9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan standar mutu tata pamong dan tata kelola melalui Audit Mutu Internal (AMI).

4. Definisi Istilah

1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam institusi perguruan tinggi yang mengelola program studi.
2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 7/ 17 halaman

	untuk menimbulkan kepercayaan. - Transparansi adalah keterbukaan - Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas segala aktifitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholdernya. - Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa - Berkeadilan adalah mempunyai keadilan - Kebijakan sistem pengelolaan fungsional adalah siklus fungsional pengelola. - Sistem operasional perguruan tinggi adalah siklus pelaksanaan perguruan Tinggi. - Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. - Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. - Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. - Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. - Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi. - Pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan lebih baik.
5. Pernyataan Isi Standar	A. Sistem Tata Pamong Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan dalam berbagai

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 8/ 17 halaman

	kebijakan dan/atau peraturan yang bisa digunakan secara konsisten agar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dapat dicapai sehingga akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi risiko terjamin mutunya; 2) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam diagram lengkap yang terdiri dari berbagai unsur yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki dokumen tata kelola institusi yang jelas tentang tugas pokok, fungsi (tupoksi), dan wewenang guna menjamin terlaksananya fungsi manajemen tata kelola perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien; 4) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan insitusi yang baik, bersih dan akuntabel mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien; 5) Poltekkes Kemenkes Surabaya membuat dan mempertanggung jawabkan laporan kinerja tahunan kepada masyarakat/ publik; dan 6) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki lembaga dan/atau organ yang sepenuhnya melaksanakan fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien. B. Kepemimpinan 7) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki dokumen formal (pengembangan karir pegawai) guna penetapan kebutuhan sumber daya manusia (Dosen, Tendik) pada berbagai unit kerja yang bisa dipertanggung jawabkan; 8) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki dokumen tertulis tentang tugas pokok, fungsi dan wewenang pejabat struktural, pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan dan pejabat fungsional tertentu dan harus
--	--

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 9/ 17 halaman

	disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat; 9) Poltekkes Kemenkes Surabaya mengalokasikan pendanaan untuk investasi sumber daya manusia yang memadai; 10) Setiap pimpinan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memiliki karakteristik kepemimpinan efektif yang mampu menggerakkan organisasi dan meningkatkan budaya kerja organisasi, yang ditunjukkan dari aspek kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisatorik, dan kepemimpinan publik dalam bentuk kebijakan dan/atau keputusan; 11) Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, sehingga budaya organisasi bisa tercipta, ditunjukkan dari dokumen program kerja kegiatan dan anggaran; C. Pengelolaan 12) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>); 13) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki dokumen formal dalam bentuk buku panduan akademik, panduan kemahasiswaan, panduan penelitian, panduan Pengabmas, panduan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, panduan kerjasama, panduan pengembangan SDM, panduan penatausahaan laporan keuangan, panduan penatausahaan BMN, dan panduan
--	--



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA

Kode : PJM-ST-PD-03

Tanggal : Januari 2023

Revisi : 1

Halaman : 10/ 17 halaman

pengembangan softskill mahasiswa;

- 14) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki dokumen formal berupa dokumen Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek : adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

D. Penjaminan Mutu

- 15) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang;
- 16) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu dalam bentuk aplikasi mandatory;
- 17) Poltekkes Kemenkes Surabaya menjalankan SPMI untuk seluruh aras atau organ organisasi yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya. Dimana 5 aspek tersebut adalah :
- a. Tersedia pusat penjaminan mutu yang dibuktikan secara legal standing;
 - b. Tersedia dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur mutu dan dokumen lain yang diperlukan);
 - c. Tersedianya auditor internal yang dibuktikan dengan legal standing pembentukan auditor internalnya;

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 11/ 17 halaman

	d. Tersedia audit program dan audit planning; e. Tersedia hasil kegiatan audit,dan f. Tersedia bukti tindak lanjut hasil audit dalam bentuk rapat tinjauan manajemen. 18) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras implementasi SPMI; 19) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu : hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, adanya perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan; 20) Poltekkes Kemenkes Surabaya di tingkat Poltekkes/Direktorat memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga nasional dan/atau internasional; 21) Tingkat program studi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga akreditasi mandiri secara nasional dan/atau internasional; 22) Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan sudit eksternal oleh akuntan publik setiap tahun sekali; 23) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja utama dan indiaktor kinerja tambahan yang hasilnya bisa diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan; 24) Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan meliputi aspek : capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat,
--	---

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 12/ 17 halaman

	dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan hasil analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi; 25) Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut: - menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, - dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, - dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, - tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
6. Strategi Pencapaian Standar	Strategi pencapaian standar yang telah ditetapkan, Poltekkes Kemenkes Surabaya harus : - Direktur melakukan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika tentang standar mutu tata pamong dan tata kelola di setiap pertemuan dinas, rapat-rapat pimpinan, dan/atau pembinaan pegawai; - Direktur memastikan bahwa dokumen rencana strategis, dokumen rencana operasional tahunan dalam bentuk dokumen rencana strategis bisnis (RBA) selalu di review agar tetap update mengikuti perubahan regulasi; - Direktur mewujudkan tata kelola organisasi yang baik



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA

Kode : PJM-ST-PD-03

Tanggal : Januari 2023

Revisi : 1

Halaman : 13/ 17 halaman

dan bersih menuju zona integritas, meningkat ke wilayah bebas dari korupsi dan akhirnya menjadi wilayah birokrasi yang bersih dan melayani;

- 4) Direktur menilai kinerja para wakil direktur dan ketua jurusan terhadap capaian target kinerja untuk mengukur capaian IKU Direktur, selanjutnya atasan langsung pegawai yang ditunjuk melakukan penilaian atas kinerja bawahannya untuk mengukur capaian IKU Direktur;
- 5) Direktur melalui Wakil Direktur II bidang umum, keuangan dan kepegawaian menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka mencapai isi standar mutu tata pamong dan tata kelola;
- 6) Direktur merencanakan dan mengimplementasikan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain;
- 7) Direktur melalui Wakil Direktur II melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru baik pejabat struktural, pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum;
- 8) Wakil Direktur II bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian bersama Kepala Bagian Umum dan Akademik menyediakan semua dokumen pendukung tata pamong dan tata kelola;
- 9) Kepala Bagian Umum dan Akademik selalu update mengikuti perubahan regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan/atau Keputusan Menteri mengenai tata kelola perguruan tinggi;
- 10) Kepala Bagian Umum dan Akademik dibantu Kasubbag Administrasi Akademik melakukan survei kepuasan internal terhadap layanan yang diberikan institusi;
- 11) Kepala Pusat Penjaminan Mutu merencanakan dan mengimplementasikan rapat tinjauan manajemen terhadap hasil audit mutu internal, umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 14/ 17 halaman

	sebelumnya, adanya perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan; 12) Kepala Pusat Penjaminan Mutu merencanakan, menyiapkan dan melakukan pendampingan terhadap program studi dan institusi pengelola program studi yang akan melakukan re-akreditasi; 13) Kaprodi melaporkan hasil kinerja dalam pengelolaan satuan pendidikannya dalam bentuk dokumen EDPS dan LKPS setiap akhir tahun; 14) Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar mutu tata pamong dan tata kelola melalui kegiatan audit oleh auditor internal.																																														
7. Indikator Pencapaian Standar	Indikator Kinerja Utama : <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">IKU</th><th colspan="4">Target Tahun</th></tr><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td>1</td><td>Ketersediaan dokumen tata kelola</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr><tr><td>2</td><td>Ketersediaan dokumen Monev tata pamong dan tata kelola</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr><tr><td>3</td><td>Ketersediaan SOTK Institusi</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr><tr><td>4</td><td>Ketersediaan dokumen kebijakan dan/atau peraturan terkait tata pamong dan tata kelola</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr><tr><td>5</td><td>Ketersediaan dokumen SPMI (Kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, dan formulir pendukung)</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr><tr><td>6</td><td>Ketersediaan dokumen Renstra, Renstrib, dan Renop/RBA</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td><td>Ada</td></tr></table>	No	IKU	Target Tahun				2022	2023	2024	2025	1	Ketersediaan dokumen tata kelola	Ada	Ada	Ada	Ada	2	Ketersediaan dokumen Monev tata pamong dan tata kelola	Ada	Ada	Ada	Ada	3	Ketersediaan SOTK Institusi	Ada	Ada	Ada	Ada	4	Ketersediaan dokumen kebijakan dan/atau peraturan terkait tata pamong dan tata kelola	Ada	Ada	Ada	Ada	5	Ketersediaan dokumen SPMI (Kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, dan formulir pendukung)	Ada	Ada	Ada	Ada	6	Ketersediaan dokumen Renstra, Renstrib, dan Renop/RBA	Ada	Ada	Ada	Ada
No	IKU			Target Tahun																																											
		2022	2023	2024	2025																																										
1	Ketersediaan dokumen tata kelola	Ada	Ada	Ada	Ada																																										
2	Ketersediaan dokumen Monev tata pamong dan tata kelola	Ada	Ada	Ada	Ada																																										
3	Ketersediaan SOTK Institusi	Ada	Ada	Ada	Ada																																										
4	Ketersediaan dokumen kebijakan dan/atau peraturan terkait tata pamong dan tata kelola	Ada	Ada	Ada	Ada																																										
5	Ketersediaan dokumen SPMI (Kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, dan formulir pendukung)	Ada	Ada	Ada	Ada																																										
6	Ketersediaan dokumen Renstra, Renstrib, dan Renop/RBA	Ada	Ada	Ada	Ada																																										

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-03
		Tanggal : Januari 2023
	STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 1
		Halaman : 15/ 17 halaman

	7	Kepuasan kinerja Institusi	3,65	3,66	3,67	3,68
	Indikator Kinerja Tambahan					
	No	IKU	Target Tahun			
			2022	2023	2024	2025
	1	Memiliki sertifikat ZI	Ada	Ada	Ada	Ada
	2	Memiliki sertifikat WBK	Ada	Ada	Ada	Ada
	3	Memiliki sertifikat WBBM	Ada	Ada	Ada	Ada
	4	Nilai SAKIP dan LAKIP	96,5	96,6	96,7	96,8
	5	Frekuensi AMI	1	1	1	1
	6	Frekuensi audit oleh akuntan publik	1	1	1	1
8. Dokumen Terkait	6	Ketersediaan auditor AMI	Ada	Ada	Ada	Ada
	Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah :					
	1. Dokumen Statuta Polkesbaya;					
	2. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Polkesbaya;					
	3. Dokumen Rencana Operasional Tahunan Polkesbaya;					
	4. Dokumen RBA;					
	5. Buku kebijakan mutu					
	6. Buku manual mutu					
	7. Buku standar mutu					
	8. SOP terkait tata pamong dan tata kelola					
9. Referensi	9. Buku panduan manajemen tata kelola;					
	10. Buku pedoman survei kepuasan pelanggan;					
	11. Buku pedoman audit mutu internal;					
	12. Buku panduan akademik;					
	13. Buku panduan kemahasiswaan;					
	14. Buku panduan pengembangan softskill mahasiswa;					
	15. Formulir pendukung SOP tata pamong dan tata kelola					
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik					



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA

Kode : PJM-ST-PD-03

Tanggal : Januari 2023

Revisi : 1

Halaman : 16/ 17 halaman

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai Istitansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum.
3. Buku borang akreditasi LAM-PTKes.